

Desa Kemudo Percontohan PPKM Mikro

KLATEN (KR) - Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Klaten, menjadi percontohan penerapan PPKM Mikro. Pemerintah desa setempat berhasil menekan kasus Covid-19, sehingga kini sudah dalam kategori zona hijau. Sehubungan hal itu, Kapolres Klaten AKBP Edy Suranta Sitepu, Dandim 0723/Klaten Letkol Inf Joni Eko Prasetyo, bersama sejumlah pejabat melaksanakan pengecekan penerapan PPKM Mikro di desa tersebut, Selasa (23/2) sore.

Kepala Desa Kemudo, Hermawan Kristanto, mengemukakan sebelum kembali ke zona hijau, total warga yang terpapar Covid-19 akhir Desember 2020 hingga Januari 2021 sebanyak 26 orang. Sebelumnya sudah ada 4 warga yang positif Covid 19, sehingga total sebanyak 30 orang. Selanjutnya pemerintah desa mengambil langkah sigap, yang kontak erat dengan penderita dibiayai dari desa, untuk rapid antigen.

"Biayanya memang agak tinggi, tapi ini konsekuensi kita agar masyarakat tidak panik, psikologis terjaga, dan masyarakat mudah diarahkan saat harus isolasi mandiri," kata Hermawan Kristanto. Warga yang isolasi mandiri diberi jatah hidup sebesar Rp 30.000/orang/hari, selama isolasi. Biaya diberikan pada PKK di tingkat RT/RW, untuk mencukupi kebutuhan warga yang isolasi tersebut. Setiap sore, ibu-ibu PKK menyapa melalui WA menanyakan kebutuhan warga yang isolasi. Jadi mereka merasa diperhatikan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Klaten dan rombongan membagikan 30 paket sembako, meninjau pembuatan masker, usaha UMKM, warung hidup serta ruang isolasi mandiri di Desa Kemudo. Kegiatan pengecekan dilakukan untuk memastikan penerapan program PPKM Mikro yang diinstruksikan pemerintah berjalan dengan baik di seluruh desa di Klaten.

Kapolres menambahkan, Posko PPKM Mikro sudah didirikan di seluruh desa di Klaten, total 401 posko dan semuanya sudah berjalan efektif. Hasilnya ada penurunan penyebaran Covid-19 sekitar 40% sejak diberlakukannya PPKM Mikro. Dandim Letkol Inf Joni Eko Prasetyo berharap, hal yang dilakukan oleh Desa Kemudo bisa ditularkan ke desa-desa lain. Dengan demikian, angka penularan dan kematian akibat Covid-19 semakin bisa ditekan sekaligus meningkatkan angka kesembuhan.

(Sit)



Kapolres, Dandim dan Kades mengecek lingkungan isolasi mandiri.

KR-Sri Warsiti

PLN Amankan Gardu Induk Tambaklorok

SEMARANG (KR) - Tim PLN UPT Semarang melakukan pengamanan gerak cepat untuk mengamankan Gardu Induk Tambaklorok akibat banjir disertai hujan intensitas lebat melanda Semarang Selasa (23/2), sehingga Gardu Induk Tambaklorok terendam air setinggi 65 centimeter.

Sampai dengan pukul 21.00, Tim PLN Semarang Tengah mengupayakan penanganan terhadap banjir dengan cara mengurangi Switchyrd menggunakan pompa untuk mengurangi potensi kenaikan air.

"Saat ini kami terus melakukan monitoring ketinggian level air terhadap peralatan instalasi yang beda di titik terendah agar tidak terjadi pemadaman," jelas I Made Sugata Merta, Rabu (24/2).

Sekitar 20 petugas Tim PLN ULTG Semarang dikerahkan guna mengamankan Gardu Induk Tambaklorok dari banjir, yang berkuang 4 centimeter dari kondisi awal. Dalam beberapa hari ke depan, Tim PLN akan terus melakukan pemantauan dan akan terus bersiaga terhadap genangan air seperi Gardu Induk Tambaklorok maupun gardu-gardu yang dimiliki PLN.

Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Semarang Donny Adriansyah menambahkan guna mengantisipasi listrik PLN terpkts menghentikan aliran listrik sementara, pihaknya mohon maaf kepada masyarakat yang berdampak.



KR-Fredo

Petugas PLN UPP Semarang melakukan langkah-langkah pengamanan Gardu Induk Tambaklorok. (Foto: S24PLN)

Hujan Lebat, Kota Semarang Dikepung Banjir

SEMARANG (KR) - Kota Semarang, Selasa (23/2) sore dikepung banjir dan bencana akibat guyuran hujan lebat selama beberapa jam. Tak seperti banjir yang terjadi pada awal bulan, banjir kali ini hampir merendam seluruh wilayah Semarang bawah.

Hampir seluruh kawasan Semarang Utara, Timur, Tengah, Barat, Selatan dan Genuk tak luput dari banjir yang menggenang.

Kawasan Simpanglima yang menjadi jantung kota ikut terendam. Genangan mencapai ketinggian sekitar 50 sentimeter. Tak ada yang tak terendam banjir, bahkan air sudah menutup trotoar sepanjang depan Gedung Matahari Departemen Store. Jalan jenderal Ahmad Yani, Jalan Pandanaran dan Jalan Gajahmada pun ikut terendam. Bahkan di depan Mal dan Hotel trentrem yang tak pernah banjir, kemarin sore terendam banjir hingga ketinggian sekitar 60 sentimeter.

Banjir terparah terjadi di kawasan Kota Lama Semarang.

Kawasan Jurnatan genangan air mencapai 1 meter sehingga kendaraan yang melintas banyak yang mogok karena mati mesinnya. Banjir juga menggenang Kampung wisata di kawasan Kota Lama, tak jauh dari Jurnatan. Ali Basya (60) warga Kp Batik mengatakan banjir pada kemarin sore adalah yang paling cepat menggenang dan tertinggi. "Kampung kami tergenang. Bagi rumah-rumah yang masih rendah permukaan lantainya tak bisa menyelamatkan diri dari genangan banjir. Saya kira pada awal

Februari lalu adalah banjir yang terdasyat kami alami, tapi ternyata kali ini lebih tinggi dan cepat terjadi," ungkap Ali Basya.

Daerah Genuk yang merupakan pintu masuk dan ke luar Kota Semarang dari barat berbatasan dengan Demak juga ikut lumpuh. Danramil Genuk Kapten Inf Purwoto mengungkapkan setelah satu jam hujan lebat sekitar pukul 15.15 WIB, ketinggian air di sekitar jembatan tol Kaligawe sudah cukup mengkhawatirkan pengguna jalan, oleh petugas Polantas Polsek Genuk dan Polrestabes Semarang langsung dinyatakan tertutup dan dialihkan. Arus kendaraan dari Demak yang ingin masuk ke Semarang langsung dibelokkan ke Jalan Wolter Monginsidi.

Danramil Semarang Utara dan Timur, Mayor Arh Sulistyono, menyampaikan banjir melanda hampir seluruh wilayahnya, ter-

utama Kota Lama dan Semarang Utara. Terparah di Semarang Utara selain wilayah Kemijen Kaligawe juga Jalan Citarum, Jalan Dr Cipto dan Jalan MT Haryono atau Mataram. Kawasan Jurnatan pada sekitar pukul 17.00 WIB sulit ditembus kendaraan, baik motor maupun mobil. "kami mendata ada beberapa kasus pohon tumbang antara lain di Jalan Dorang Semarang Utara.

Di wilayah Semarang Tengah, Danramil Semarang Tengah Mayor Arh Sugiharto menyampaikan terjadi kasus pohon tumbang di Jalan Karangaru, tepatnya di depan Gereja Karangaru. "Pohon tumbang nyaris saja mengenai seorang yang melintas. Tak ada korban jiwa namun di beberapa wilayah terpaksa aliran listriknya dipadamkan untuk menghindari terjadinya konsleting atau hubungan arus pendek listrik," ungkap Mayor Arh Sugiharto. (Cha/Bdi)

RT/RW UJUNG TOMBAK KEBERHASILAN PENERAPAN PPKM MIKRO



MEMBANGUN kesadaran masyarakat sangatlah penting untuk menekan tingkat penyebaran Covid-19, khususnya di Jawa Tengah. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa berbahayanya virus covid 19 dan sangat mematikan tersebut, masyarakat akan memiliki pemahaman yang kuat bagaimana untuk mencegah agar tidak terpapar covid.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto dalam diskusi soal Aspirasi Jawa Tengah dengan topik "PPKM Mikro Solusi Tekan Covid-19, Bagaimana Pelaksanaannya di Jawa Tengah?". Diskusi dilakukan di Surakarta Selasa (23/2).

Diskusi yang dipandu oleh host Enie Astitie dan Bona Ventura tersebut, juga menghadirkan narasumber Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Jateng Sugeng Riyanto, dan Sri Hastarjo selaku Kepala Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Menurut Bambang Kusriyanto, dengan memberikan pemahaman secara optimal kepada masyarakat tentang bahayanya covid 19, diharapkan masyarakat akan mematuhi aturan protokol kesehatan dan akan terbiasa dengan pola hidup baru di tengah pandemi covid.

Dengan memiliki kesadaran tinggi dan rasa bertanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya, maka penerapan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari adanya kerumunan akan bisa menjadi sebuah pembiasaan hidup sehari-hari.

"Dengan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan melalui kegiatan sosialisasi yang masif, saya yakin kebijakan Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat akan berjalan

kebijakan PPKM adalah tokoh masyarakat di tingkat RT dan RW. Hanya saja hingga saat ini RT dan RW belum memiliki kekuatan secara hukum untuk bisa mengendalikan masyarakatnya.

Ketentuan untuk menguatkan peran RT RW untuk bisa memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat masih sangat lemah. Untuk itu Bambang minta kepada pemerintah daerah untuk memberi peran yang lebih luas kepada RT dan RW agar mereka memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian kegiatan masyarakat.

"Permasalahan yang dihadapi oleh pengurus RT dan RW

bisa menggunakan dana hingga 8 persen dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des)," ujar Bambang.

Terkait masalah tersebut, Sugeng Riyanto mengemukakan, aturan untuk bisa menggunakan dana APBDes untuk membangun dan operasional Posko PPKM ada pada Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 1/2021, yang menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, dan minimal 8 persen untuk penanganan Covid-19.

Secara keseluruhan menurut Sugeng Riyanto, Pemprov Jawa Tengah sebenarnya dalam ke-



KR-Budiono

Bambang Kusriyanto (tengah) saat diskusi soal Aspirasi Jawa Tengah dengan topik "PPKM Mikro Solusi Tekan Covid-19, Bagaimana Pelaksanaannya di Jawa Tengah?". (KR-Budiono)

dengan efektif di Jawa Tengah, karena kuncinya ada di ketertiban masyarakat itu sendiri," tutur Bambang Kusriyanto.

Menurut Bambang yang akrab disapa Bambang Kribo ini, yang menjadi ujung tombak dari

khususnya yang berada di perkotaan dalam mengoptimalkan perannya sangat sulit, karena terbentuk persoalan dana. Berbeda dengan peran RT dan RW di pedesaan. Mereka jika ingin membangun posko PPKM Mikro

bijakan PPKM Mikro sudah memiliki embrio mengenai pemberdayaan masyarakat, yakni membentuk Satgas Jogo Tonggo. Hanya saja pembentukannya masih di tingkat RW. Namun untuk tahun ini fungsi Satgas Jogo



KR-Budiono

Bambang Kusriyanto.

Tonggo sudah sampai tingkat RT.

Dengan demikian, untuk tahun ini masyarakat di tingkat RT sudah bisa difungsikan sebagai Satgas covid 19 melalui program jogo tonggo, sehingga dalam pelaksanaan PPKM skala mikro ini, di Jawa Tengah keberadaan tokoh masyarakat khususnya pengurus RT dan RW sangat penting, karena mereka menjadi ujung tombak sukses dan tidaknya pelaksanaan PPKM mikro.

Kepala Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Sri Hastarjo mengatakan, dari sisi pengamatan akademisi, peran pemerintah dalam pelaksanaan PPKM sudah cukup optimal.

Hanya saja menurut Sri Hastarjo, selama ini yang kerap ditonjolkan dalam kasus pandemi covid 19 ini kepada masyarakat, adalah mengenai kenaikan kasus positifnya, bukan pada sisi angka kesembuhan. Untuk itu Sri Hastarjo berharap agar pola atau sistem komunikasi yang selama ini terbangun harus diubah. Harus ada rasa optimisme yang dibangun supaya masyarakat tidak khawatir. (Adv/Budiono)